

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Faktor pendorong adanya pertambangan emas tanpa izin meliputi faktor sosial yaitu faktor yang berasal dari keberadaan penambang tradisional oleh masyarakat setempat yang telah berlangsung secara turun-temurun, faktor hukum yang merupakan faktor yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku akibat kelemahan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan dan kelemahan dalam penegakan hukum dan pengawasan, faktor ekonomi yaitu lemahnya kondisi perekonomian masyarakat akibat keterbatasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha yg sesuai dengan tingkat keahlian/keterampilan masyarakat bawah dan karena adanya keberadaan pihak ketiga dalam memanfaatkan kemiskinan yaitu penyanggah dana dan backing (oknum aparat).
2. Beberapa upaya yang dilakukan untuk menegakkan hukum terhadap penambangan emas ilegal di Kabupaten Muara Bungo yaitu upaya preventif bertujuan mencegah pelanggaran norma dengan menghindari pertemuan niat dan kesempatan, sehingga keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga, kemudian upaya represif adalah langkah penindakan oleh aparat hukum sebagai kelanjutan dari upaya preventif sesudah terjadinya pelanggaran.

B. SARAN

1. Penulis menyarankan agar pemerintah memperkuat regulasi terkait tambang emas ilegal dengan adanya kebijakan yang tegas dalam mengusut tuntas kasus PETI yang berkembang saat ini dengan cara menindak pelaku , Aktor maupun oknum lain yang ikut andil berkepentingan tanpa pandang bulu, baik oknum yang menggunakan alat berat maupun hanya menggunakan mesin dompeng yang dalam kasus ini menyebabkan kerusakan lingkungan akibat oknum-oknum PETI tersebut.
2. Penulis menyarankan kepada Aparat kepolisian Muara Bungo agar lebih aktif mengedukasi masyarakat tentang peraturan perundang-undangan mengenai larangan dan bahaya dari PETI, dengan cara terjun langsung kelapangan bukan hanya sekadar lewat spanduk dan sosialisasi saja tetapi harus bergerak secara nyata dengan menempatkan personil untuk melaksanakan Patroli dan Razia rutin di setiap kecamatan yang rawan terjadi PETI . selain itu juga diharapkan agar kepala kepolisian mampu memfasilitasi sarana dan prasarana yang memadai agar dapat mendukung kinerja kepolisian.